Editor:
Ahmadin, Iham Samudra Sanur, Najamuddin

PEMETAAN PROBLEMATIKA SOSIAL

Konsep, Teori, dan Arah Kebijakan



Welly Ervina Solissa, Nurfadila Sjarif, Tekla Galla' Manase,
Sahrah Fadillah Usman, Nur Hikmah Safira, Nezha Pangarungan,
Nur Hidayah, Richlah Nur Madjina, Ma'shumah Syamsir,
Muhammad Hamka Halim, Nurul Syahruni,
Widya Anugrah Rusdi, Astria Wulandari, Nur Fadhilah Murtadir,
Rahma Awalia, Dwita Aprilla Amir, Aidul Akbar, Sinta Prahastini,
Sul Padli, Nurul Aulia, Alfian Dahrun

Editor:
Ahmadin, Iham Samudra Sanur, Najamuddin

PEMETAAN PROBLEMATIKA SOSIAL

Konsep, Teori, dan Arah Kebijakan

Welly Ervina Solissa, Nurfadila Sjarif, Tekla Galla' Manase,
Sahrah Fadillah Usman, Nur Hikmah Safira, Nezha Pangarungan,
Nur Hidayah, Richlah Nur Madjina, Ma'shumah Syamsir,
Muhammad Hamka Halim, Nurul Syahruni,
Widya Anugrah Rusdi, Astria Wulandari, Nur Fadhilah Murtadir,
Rahma Awalia, Dwita Aprilla Amir, Aidul Akbar, Sinta Prahastini,
Sul Padli, Nurul Aulia, Alfian Dahrun

Penerbit Widina

PEMETAAN PROBLEMATIKA SOSIAL
Konsep, Teori, dan Arah Kebijakan

Tim Penulis:
Welly Ervina Solissa, Nurfadila Sjarif, Tekla Galla' Manase, Sahrah Fadillah Usman, Nur Hikmah Safira, Nezha Pangarungan, Nur Hidayah, Richlah Nur Madjina, Ma'shumah Syamsir, Muhammad Hamka Halim, Nurul Syahruni, Widya Anugrah Rusdi, Astria Wulandari, Nur Fadhilah Murtadir, Rahma Awalia, Dwita Aprilla Amir, Aidul Akbar, Sinta Prahastini, Sul Padli, Nurul Aulia, Alfian Dahrun

Desain Cover:
Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Ahmadin
Ilham Samudra Sanur
Najamuddin

QRCBN:
62-1256-0492-007

Cetakan Pertama:
September, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Perubahan sosial yang dipicu oleh globalisasi, disrupsi teknologi, krisis ekologi, serta transformasi ekonomi dan politik, telah memunculkan ragam problematika dalam kehidupan masyarakat. Fenomena sosial ini semakin menambah kompleks masalah lama seperti: kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan tindak kekerasan. Buku berjudul "*Pemetaan Problematika Sosial: Konsep, Teori, dan Arah Kebijakan"* hadir sebagai instrumen untuk memahami, memetakan, serta menganalisis aneka masalah sosial di tengah masyarakat kontemporer. Model pemecahan masalah melalui pemetaan sosial, dalam operasionalnya tidak hanya berorientasi pada identifikasi masalah tetapi juga menjadi dasar bagi proses penentuan kebijakan. Hal ini penting agar proses penentuan kebijakan publik sesuai dengan sasaran, berbasis data, serta berpihak pada kelompok yang membutuhkan.

Buku yang terdiri atas 21 bab ini, secara teoretik telah menelaah aneka problematika sosial melalui metode pemetaaan, dengan menghadirkan isu-isu krusial, seperti: kemiskinan di perkotaan, urbanisasi, ketimpangan akses pendidikan, masalah kesehatan, krisis lingkungan, hingga disrupsi teknologi dan narkotika. Untuk memudahkan pembaca menemu kenali istilah-istilah penting terkait isu yang dibahas, maka setiap bab buku ini dilengkapi oleh glosarium. Demikian pula daftar pustaka diletakkan pada setiap bab, dengan maksud untuk memudahkan pembaca menelusuri lebih jauh pembahasan topik tertentu melalui penelusuran pustaka atau bacaan lebih lanjut termasuk untuk membandingkan.

Bahasan buku ini menggunakan istilah yang seragam yakni problematika sosial yang sepadan dengan istilah *social problem* dengan asumsi bahwa lingkupnya tidak sebatas hanya pada kondisi obyektif suatu masalah, tetapi juga menyoal lebih jauh pada proses konstruksi sosial yang menyertainya. Demikian pula pembahasan pada bab-bab tertentu yang dilengkapi studi kasus berdasarkan data dan tema yang relevan, dimaksudkan bukan untuk merepresentasikan keterwakilan wilayah pada kajian suatu topik, tetapi memberi pengalaman belajar bagi pembaca melalui fakta-fakta unik atau isu fenomenal.

Tiga isu strategis menjadi penutup bahasan dari buku ini yakni kajian tentang kebijakan publik berbasis data, pemanfaatan Sistem Informasi Geogrfis (GIS), dan Big Data dalam pemetaan sosial serya strategi transformasi sosial melalu *community development, social entrepreneurship,*

dan pemberdayaan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa buku ini tidak hanya menghamparkan model analisis kritis atas realitas sosial, tetapi juga menawarkan kerangka konsep bagi solusi yang sifatnya berkelanjutan.

Semoga buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi, pemerintah, serta pemerhati masalah sosial.

Makassar, 24 April 2026
Editor,
Ahmadin
Ilham Samudra Sanur
Najamuddin

PENGANTAR PENULIS

Tiada kata yang paling pantas selain ungkapan puji syukur ke khadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan kesempatan yang senantiasa diberikan kepada kami sehingga dapat merampungkan penulisan buku berjudul *"Pemetaan Problematika Sosial: Konsep, Teori, dan Arah Kebijakan"*. Buku ini hadir sebagai wujud keprihatinan kolektif kami atas kompleksitas masalah sosial yang melanda masyarakat kontemporer, baik dalam skala lokal, nasional, dan global. Selain itu, buku ini juga merupakan refleksi dari kesadaran ilmiah bersama bahwa pemahaman sistematis berbasis data adalah langkah strategis awal untuk mendesain model intervensi sosial dalam merumuskan pemecahan masalahnya.

Gagasan penulisan buku ini tidak lahir begitu saja, tapi disemangati oleh tiga pertimbangan ilmiah utama. *Pertama*, kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa problematika sosial yang demikian kompleks, tidak lagi cukup dikaji secara monodisiplin. *Kedua*, berbagai kebijakan publik yang sejauh ini diterapkan oleh pemerintah kota, masih seringkali kurang tepat sasaran. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak dilakukannya pemetaan sosial secara akurat dalam proses desain intervensi kebijakan. *Ketiga*, masih terbatasnya kajian tentang pemetaan problematika sosial yang secara spesifik mengulas tentang konsep, teori, dan arah kebijakan di Indonesia.

Kajian buku ini terdiri atas tiga bagian utama, yakni: Bab 1 hingga bab 3, membahas tentang pengenalan terhadap konsep problematika sosial, landasan teori, serta metodologi pemetaan sosial. Bab 4 hingga 18, membahas secara spesifik tentang aneka problematika sosial secara tematik, mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, pendidikan, kesehatan kekerasan gender, konflik sosial, disibilitas, wilayah pesisir, krisis ekologi, teknologi, narkotika, anak dan resiko remaja, dan migrasi. Bab 19 hingga 21 menyoal tentang kebijakan publik, pemetaan GIS dan Big Data serta strategi transformasi sosial berbasis pemberdayaan partisipatif.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, khususnya pada aspek kajian tematik yang belum sepenuhnya komprehensif. Selain itu, keterbatasan data, subyektifitas dalam perspektif, serta kasus problematika sosial yang senantiasa berubah seiring dinamika sosial, menjadi faktor yang sulit dihindari dari. Untuk maksud tersebut, buku ini setidaknya akan menjadi bagian dari literatur lainnya yang membahas topik serupa serta menjadi bacaan alternatif

khususnya dalam memperkaya wawasan tentang problematika sosial serta strategi pemetaannya.

Buku ini juga dapat dirampungkan hingga bisa hadir di hadapan pembaca, juga karena bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terima kasih kami haturkan kepada bapak Dr. Ahmadin, S.Pd., M.Pd., dan bapak Dr. Najamuddin, M.Hum., sebagai dosen yang mengajar kami dalam berbagai mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar serta dengan setia menemati berdiskusi. Demikian pula kami ucapkan terima kasih kepada bapak Ilham Samudra Sanur, S.Pd., M.Pd., atas segala bantuannya dalam diskusi serta proses editing buku ini.

Semoga kehadiran buku ini dapat memberi kontribusi berharga khususnya pada kajian tentang pemetaan masalah sosial serta menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, serta segenap pihak pemerhati kajian kebijakan publik.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat!

Makassar, 10 April 2026
Penulis,

(Welly Ervina Solissa, dkk)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
PENGANTAR PENULIS ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB 1. PENGANTAR PEMETAAN PROBLEMATIKA SOSIAL **1**
A. Definisi Masalah Sosial Dalam Konteks Kontemporer 1
B. Karakteristik dan Indikator Masalah Sosial 4
C. Urgensi Pemetaan Sosial dalam Pembangunan 12
D. Ruang Lingkup dan Pendekatan Analisis 18
Glosarium 20
Daftar Pustaka 22
Biodata Penulis 23
BAB 2. TEORI-TEORI PROBLEMATIKA SOSIAL **25**
A. Fungsionalisme dan Disfungsi Sosial 25
B. Teori Konflik dan Ketimpangan Struktural 32
C. Interaksionisme Simbolik 40
D. Teori Kritis dan Hegemoni 42
E. Perspektif Postmodern dan Globalisasi 51
Glosarium 60
Daftar Pustaka 63
Biodata Penulis 66
BAB 3. METODOLOGI PEMETAAN SOSIAL **67**
A. Konsep Dasar *Social Mapping* 67
B. Metode Kuantitatif Dalam Pemetaan Sosial: Survei dan Statistik Sosial 74
C. Metode Kualitatif Dalam Pemetaan Sosial: Wawancara, FGD, dan Observasi 81
D. Participatory Rural Appraisal (PRA) 88
E. Etika Penelitian Sosial: Menjaga Martabat Manusia Dalam Setiap Langkah 95
Glosarium 102
Daftar Pustaka 105
Biodata Penulis 108
BAB 4. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN SOSIAL **111**
A. Konsep Kemiskinan Absolut dan Relatif 111
B. Kemiskinan Struktural Vs Kultural 116
C. Indeks Gini dan Indikator Ketimpangan 120

D. Program Penanggulangan Kemiskinan 124
E. Studi Kasus Regional 130
Glosarium 136
Daftar Pustaka 136
Biodata Penulis 147
BAB 5. PENGANGGURAN DAN KERENTANAN EKONOMI 149
A. Tipe-Tipe Pengangguran 149
B. Ekonomi Informal dan Gig Economy 156
C. PHK dan Disrupsi Teknologi..... 161
D. Strategi Pemberdayaan Ekonomi 168
Glosarium 174
Daftar Pustaka 177
Biodata Penulis 180
BAB 6. URBANISASI DAN PERMUKIMAN KUMUH 181
A. Teori Urbanisasi 181
B. Migrasi Desa Kota 192
C. Slum Area dan Masalah Sanitasi 194
D. Kebijakan Penataan Kota 195
Glosarium 197
Daftar Pustaka 199
Biodata Penulis 200
BAB 7. PENDIDIKAN DAN KETIMPANGAN AKSES 203
A. Stratifikasi Pendidikan 206
B. Digital Divide 211
C. Putus Sekolah dan Kemiskinan 216
D. Reformasi Kebijakan Pendidikan 223
Glosarium 226
Daftar Pustaka 231
Biodata Penulis 233
BAB 8. PROBLEMATIKA KESEHATAN MASYARAKAT 235
A. Determinan Sosial Kesehatan 237
B. Stunting dan Gizi Buruk 246
C. Kesehatan Mental 250
D. Akses Layanan Kesehatan 254
Glosarium 259
Daftar Pustaka 262
Biodata Penulis 264
BAB 9. KEKERASAN DAN KRIMINALITAS 265
A. Pengertian dan Teori Penyimpangan Sosial 265
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga 275

C. Kejahatan Siber 278
D. Pencegahan Berbasis Komunitas 280
Glosarium 288
Daftar Pustaka 290
Biodata Penulis 292
BAB 10. GENDER DAN KETIDAKSETARAAN 295
A. Problematika Gender Dalam Perspektif Historis dan Pendidikan..... 295
B. Perspektif Feminisme 296
C. Kekerasan Berbasis Gender 299
D. Perempuan dan Ekonomi 304
E. Kebijakan Afirmatif 308
Glosarium 312
Daftar Pustaka 315
Biodata Penulis 320
BAB 11. KONFLIK SOSIAL DAN DISINTEGRASI 321
A. Definisi Konflik Sosial dan Desintegrasi Sosial..... 321
B. Hubungan Konflik dan Disintegrasi 328
C. Konflik Horizontal 338
D. Politik Identitas 342
E. Resolusi dan Mediasi Konflik 347
F. Rekonsiliasi Sosial 349
Glosarium 353
Daftar Pustaka 356
Biodata Penulis 358
BAB 12. DISABILITAS DAN EKSKLUSI SOSIAL 359
A. Model Medis Vs Sosial 359
B. Aksesibilitas Publik 362
C. Pendidikan Inklusif 364
D. Advokasi Kebijakan 367
Glosarium 371
Daftar Pustaka 373
Biodata Penulis 375
BAB 13. PROBLEMATIKA WILAYAH PESISIR 378
A. Kemiskinan Nelayan 378
B. Abrasi dan Perubahan Iklim 381
C. Konflik Ruang Laut 386
D. Pemberdayaan Komunitas Pesisir 392
Glosarium 400
Daftar Pustaka 401

Biodata Penulis 406
BAB 14. KRISIS LINGKUNGAN 407
A. Kerusakan Hutan dan Tambang 407
B. Sampah Plastik 421
C. Perubahan Iklim 424
D. Gerakan Sosial Lingkungan 434
Glosarium 439
Daftar Pustaka 440
Biodata Penulis 444
BAB 15. TEKNOLOGI DAN DISRUPSI SOSIAL 445
A. Perkembangan Teknologi Digital..... 445
B. Media Sosial dan Polarisasi 450
C. Hoaks dan Literasi Digital 458
D. Artificial Intelligence dan Pekerjaan 465
E. Etika Digital 466
Glosarium 472
Daftar Pustaka 475
Biodata Penulis 476
BAB 16. NARKOTIKA DAN PENYIMPANGAN 477
A. Faktor Penyebab 477
B. Jaringan Peredaran 479
C. Dampak Sosial 482
D. Rehabilitasi Sosial 485
Glosarium 489
Daftar Pustaka 491
Biodata Penulis 494
BAB 17. ANAK DAN REMAJA BERISIKO 495
A. Eksploitasi Anak 495
B. Bullying 499
C. Pernikahan Dini 502
D. Perlindungan Anak 504
Glosarium 506
Daftar Pustaka 508
Biodata Penulis 510
BAB 18. MIGRASI DAN DIASPORA 511
A. Migrasi Internal 511
B. Pekerja Migran 518
C. *Brain Drain* 524
D. Integrasi sosial 530
Glosarium 541

Daftar Pustaka 543
Biodata Penulis 545
BAB 19. KEBIJAKAN PUBLIK 547
A. Analisis Kebijakan Sosial 547
B. Perencanaan Berbasis Data 558
C. Monitoring dan Evaluasi 566
D. *Good Governance* 570
Glosarium 573
Daftar Pustaka 575
Biodata Penulis 587
BAB 20. GIS DAN BIG DATA 589
A. Konsep Pemetaan Sosial 589
B. Data Sosial Berbasis Lokasi 594
C. Visualisasi Problem Sosial 598
D. *Smart City* 601
Glosarium 603
Daftar Pustaka 605
Biodata Penulis 606
BAB 21. STRATEGI TRANSFORMASI SOSIAL 607
A. *Community Development* 607
B. *Social Entrepreneurship* 609
C. Pemberdayaan Partisipatif 612
D. Model Intervensi Berkelanjutan 615
Glosarium 617
Daftar Pustaka 621
Biodata Penulis 625

BAB 1

PENGANTAR PEMETAAN PROBLEMATIKA SOSIAL

Welly Ervina Solissa

A. DEFINISI MASALAH SOSIAL DALAM KONTEKS KONTEMPORER

Dalam paradigma sosiologi modern, masalah sosial tidak lagi dipandang sekadar sebagai fenomena statistik statis mengenai kemiskinan atau kriminalitas, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah konstruksi sosial yang dinamis. Secara teoretis, Rubington & Weinberg (2010) menegaskan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang dinyatakan oleh sekelompok orang yang berpengaruh sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai mereka dan memerlukan tindakan kolektif segera. Definisi ini menggeser fokus dari "kondisi fisik" menjadi "pengakuan sosial", di mana suatu fenomena baru dianggap sebagai masalah ketika masyarakat atau pemangku kepentingan menyepakati bahwa kondisi tersebut merugikan stabilitas (Merton, 1976; Spector & Kitsuse, 2017; Blumer, 1971).

Di era digital 4.0, proses pendefinisian masalah sosial mengalami percepatan luar biasa melalui mekanisme resonansi algoritmik. Sebuah isu personal atau lokal dapat bertransformasi menjadi problematika nasional dalam hitungan jam ketika mendapatkan traksi di media sosial, yang kemudian memicu kesadaran kolektif secara masif (Best, 2017; Fuchs, 2017; Castells, 2012). Fenomena "viralitas" kini berfungsi sebagai instrumen *agenda setting* baru di mana masyarakat sipil memiliki kekuatan untuk memaksa pemerintah mengakui suatu isu sebagai prioritas kebijakan (Dijck, 2013; Marwick, 2017). Sebagai contoh, isu kekerasan di daerah terpencil yang dulu sulit terdeteksi, kini dapat menjadi tekanan publik global hanya melalui rekaman video pendek, yang membuktikan bahwa batasan antara ruang privat dan ruang publik dalam masalah sosial kian menipis (Boyd, 2014; Manyika et al., 2016).

BAB 2

TEORI-TEORI PROBLEMATIKA SOSIAL

Nurfadila Sjarif

A. FUNGSIONALISME DAN DISFUNGSI SOSIAL

1. Paradigma Fungsionalisme: Masyarakat sebagai Sistem Organik yang Terintegrasi

Dalam perspektif fungsionalisme, masyarakat dipahami sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai institusi yang saling terkait dan bekerja secara harmonis untuk mempertahankan stabilitas serta keteraturan sosial. Sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam literatur sosiologi, "masyarakat adalah sistem bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis untuk menjaga keadaan keseimbangan dan ekuilibrium sosial untuk keseluruhan" (Rahman et al., 2020). Institusi-institusi seperti keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi masing-masing memikul fungsi tertentu yang berkontribusi pada kelangsungan sistem sosial secara keseluruhan, sehingga ketika salah satu bagian gagal menjalankan fungsinya, seluruh sistem dapat terguncang (Rahman et al., 2020; Damanik, 2020). Analogi organik yang menjadi landasan fungsionalisme menekankan bahwa sebagaimana organ-organ dalam tubuh biologis saling menopang, institusi sosial pun beroperasi dalam jaringan ketergantungan yang kompleks. Dalam kerangka Talcott Parsons, institusi dipandang berkontribusi pada pemenuhan prasyarat sistem melalui skema AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency), di mana setiap elemen sistem sosial memiliki peran adaptif yang spesifik (Sulistiawati & Nasution, 2022; Junaedi et al., 2021). Pendekatan ini melihat masyarakat sebagai sistem yang terintegrasi secara fungsional dalam bentuk keseimbangan, dengan asumsi bahwa keteraturan sosial terpelihara bila institusi dapat menjalankan perannya dan mekanisme integrasiberupa norma, nilai, dan kontrol sosial bekerja secara efektif (Sulistiawati & Nasution, 2022). Implikasi analitis utama dari paradigma ini adalah bahwa

BAB 3

METODOLOGI PEMETAAN SOSIAL

Tekla Galla' Manase

A. KONSEP DASAR *SOCIAL MAPPING*

1. Memahami Esensi Pemetaan Sosial

Pemetaan sosial pada dasarnya adalah upaya sistematis untuk menggambarkan secara utuh kondisi kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Bukan sekadar membuat gambar atau peta biasa, melainkan sebuah proses mendalam untuk memahami siapa saja yang tinggal di sana, bagaimana mereka saling berhubungan, apa yang mereka miliki, dan apa yang menjadi persoalan bersama. Ketika kita berbicara tentang pemetaan sosial, kita sedang membicarakan tentang upaya untuk menangkap denyut nadi kehidupan komunitas secara utuh. Dalam praktiknya, pemetaan sosial berfungsi sebagai mekanisme untuk mengukur dan menentukan sejauh mana masyarakat terlibat dalam pembangunan di wilayahnya. Yang membedakannya dari sekadar pendataan penduduk biasa adalah perhatiannya terhadap bagaimana masyarakat itu sendiri memandang wilayah dan komunitas mereka. Setiap komunitas memiliki persepsi unik tentang lingkungannya mana yang dianggap sebagai pusat kegiatan, siapa yang dihormati sebagai pemimpin, kelompok mana yang dianggap memiliki pengaruh, dan di mana letak sumber daya yang mereka anggap penting. Persepsi-persepsi inilah yang menjadi fokus utama pemetaan sosial.

Proses pemetaan sosial biasanya dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang komunitas. Mereka inilah yang disebut sebagai informan kunci tokoh masyarakat yang disegani, tokoh agama yang menjadi panutan, pemuda yang mengetahui dinamika generasi muda, serta tokoh perempuan yang memahami realitas kehidupan keluarga dan komunitas dari perspektif gender. Melalui dialog dan diskusi dengan mereka, gambaran tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat, masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kebutuhan yang

BAB 4

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN SOSIAL

Sahrah Fadillah Usman

A. KONSEP KEMISKINAN ABSOLUT DAN RELATIF

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang banyak mendapat perhatian dalam kajian ilmu ekonomi, sosiologi, maupun pembangunan (Alawiyah & Setiawan, 2021). Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan yang dimiliki seseorang, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang layak. Oleh karena itu, para ahli mengembangkan beragam pendekatan untuk memahami serta mengukur kemiskinan secara lebih menyeluruh (Pinontoan, 2020). Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah dengan membedakan kemiskinan menjadi dua konsep utama, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Ningrum, 2017). Kedua konsep tersebut memberikan perspektif yang berbeda dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah keadaan ketika individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak (Putri & Mukramin, 2023). Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dasar, layanan kesehatan, serta kebutuhan penting lainnya seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai. Dalam konsep ini, tingkat kemiskinan ditentukan berdasarkan standar minimum tertentu yang disebut sebagai garis kemiskinan (Ningrum, 2017).

Garis kemiskinan umumnya ditetapkan berdasarkan perhitungan pengeluaran minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Sandi et al., 2023). Apabila pendapatan atau

BAB 5

PENGANGGURAN DAN KERENTANAN EKONOMI

Nur Hikmah Safira

A. TIPE-TIPE PENGANGGURAN

Pengangguran merupakan salah satu indikator fundamental dalam analisis pasar tenaga kerja yang digunakan untuk menilai tingkat pemanfaatan sumber daya manusia dalam suatu perekonomian. Secara konseptual, mereferensikan pada kondisi ketika individu yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, namun tetap aktif mencari pekerjaan serta memiliki kesiapan untuk bekerja. Dalam perspektif makro ekonomi, fenomena ini tidak semata-mata mencerminkan kesinambungan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, melainkan juga merefleksikan kompleksitas dinamika struktural, institusional, dan siklus ekonomi yang mempengaruhi mekanisme pasar kerja. Lebih lanjut, laporan *Society at a Glance* 2024: OECD *Social Indicators* menegaskan bahwa tingkat Pengangguran memiliki peran strategis sebagai indikator kinerja ekonomi sekaligus sebagai alat untuk identifikasi kerentanan sosial, terutama terkait dengan risiko eksklusi sosial dan ketidakstabilan pendapatan pada kelompok tertentu dalam masyarakat (OECD, 2024). Dengan demikian, kajian mengenai pengangguran tidak hanya penting dalam konteks ekonomi, tetapi juga relevan dalam memahami dimensi sosial yang lebih luas.

Lebih lanjut, kajian empiris menunjukkan bahwa pengangguran tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena individual, melainkan sebagai refleksi dari dinamika struktural dalam perekonomian. Dalam penelitian Salsabella, Hidayat, dan Kusuma tentang Pengangguran Terbuka dan Determinannya di Indonesia menekankan bahwa tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, seperti

BAB 6

URBANISASI DAN PERMUKIMAN KUMUH

Nezha Pangarungan

A. TEORI URBANISASI

Urbanisasi merupakan fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota yang terjadi secara terus-menerus seiring dengan perkembangan ekonomi, industri, dan modernisasi. Proses ini pada dasarnya menjadi bagian dari dinamika pembangunan wilayah, di mana kota dipandang sebagai pusat pertumbuhan yang menawarkan peluang kerja, pendidikan, dan akses terhadap berbagai fasilitas publik. Namun, urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik seringkali menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan, salah satunya adalah munculnya pemukiman kumuh (slum area).

Secara konseptual, urbanisasi tidak hanya dipahami sebagai perpindahan fisik penduduk, tetapi juga sebagai perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Menurut teori klasik urbanisasi seperti yang dikemukakan oleh Kingsley Davis, urbanisasi merupakan bagian dari proses transformasi masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sementara itu, Lewis Wirth melalui teori urbanismenya menekankan bahwa kehidupan kota memunculkan pola interaksi sosial yang khas, seperti individualisme dan heterogenitas sosial.

Dalam perspektif teori migrasi, Everett S. Lee menjelaskan bahwa urbanisasi dipengaruhi oleh faktor pendorong (push factors) dari desa seperti kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja, serta faktor penarik (pull factors) dari kota seperti peluang ekonomi yang lebih besar. Ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk perkotaan dengan ketersediaan infrastruktur dan perumahan inilah yang kemudian memicu munculnya pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh sendiri dapat dipahami sebagai kawasan hunian yang tidak layak, ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, kualitas bangunan yang rendah, keterbatasan akses

BAB 7

PENDIDIKAN DAN KETIMPANGAN AKSES

Nur Hidayah

Dalam masyarakat yang berbudaya, pendidikan adalah komponen yang sangat penting dalam proses pembentukan manusia. Kehidupan manusia mengalami transformasi yang sangat cepat dan luas di era globalisasi saat ini. Arus globalisasi ini menjangkau hampir semua aspek kehidupan kontemporer. Dalam hal ini, pendidikan adalah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan bagi Indonesia, terutama sebagai pilar utama pembangunan. Ini karena pendidikan adalah dasar strategis untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus diberikan kepada semua anggota masyarakat tanpa pengecualian, bukan hanya kelompok tertentu. Karena itu, negara ini memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan akses yang sama terhadap pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup warganya.

Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, warga negaranya telah menyadari betapa pentingnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kepentingan dalam pendidikan. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk membentuk lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat konstitusi.

Salah satu pesan penting UUD 1945 adalah bahwa pendidikan nasional diperuntukkan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang terbatas pada segelintir orang jelas bertentangan dengan amanat konstitusi dan melanggar hak asasi manusia. Pada dasarnya, pendidikan adalah organisasi sosial dengan tugas strategis

BAB 8

PROBLEMATIKA KESEHATAN MASYARAKAT

Richlah Nur Madjina

Kesehatan masyarakat di Indonesia menghadapi berbagai problematika yang kompleks, mulai dari determinan sosial kesehatan, stunting dan gizi buruk, kesehatan mental, hingga akses layanan kesehatan. Makalah ini bertujuan untuk menguraikan isu-isu tersebut berdasarkan data dan kajian terbaru lima tahun terakhir (2021–2025). Analisis menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi, lingkungan, dan ketidaksetaraan wilayah berperan besar dalam menentukan status kesehatan. Stunting dan gizi buruk masih menjadi tantangan serius meski prevalensinya menurun. Kesehatan mental, khususnya pada remaja, belum mendapat perhatian memadai. Sementara itu, akses layanan kesehatan masih timpang antarwilayah. Upaya lintas sektor dan kebijakan strategis diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Kesehatan masyarakat merupakan aspek fundamental dalam pembangunan Nasional. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan beragam, menghadapi tantangan kesehatan yang multidimensional. Problematika ini tidak hanya terkait dengan penyakit, tetapi juga faktor sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan. Oleh karena itu, analisis terhadap determinan sosial, gizi, kesehatan mental, dan akses layanan kesehatan menjadi penting untuk memahami kondisi kesehatan masyarakat Indonesia saat ini.

Dinamika kesehatan masyarakat di Indonesia menjelang tahun 2026 menggambarkan sebuah paradoks perkembangan; di satu sisi, kemajuan dalam teknologi medis dan digitalisasi layanan oleh Satu Sehat menghadirkan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara di sisi lain, isu-isu struktural seperti kemiskinan multidimensi dan ketidaksetaraan wilayah masih terus menjadi tantangan yang mengganggu. Proses transformasi dalam bidang kesehatan tidak akan mencapai potensi

BAB 9

KEKERASAN DAN KRIMINALITAS

Ma'shumah Syamsir

A. PENGERTIAN DAN TEORI PENYIMPANGAN SOSIAL

1. Pengertian

Penyimpangan sosial merupakan salah satu konsep utama dalam kajian sosiologi yang membahas tentang perilaku individu maupun kelompok yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam setiap sistem sosial, norma dan nilai memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pedoman dalam mengatur perilaku manusia agar tercipta keteraturan, stabilitas, dan harmoni sosial. Oleh karena itu, setiap tindakan yang bertentangan dengan norma tersebut akan dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial. Secara umum, penyimpangan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Norma sosial sendiri merupakan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disepakati oleh masyarakat sebagai standar perilaku yang dapat diterima. Norma ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Ketika individu melanggar norma tersebut, maka tindakan tersebut akan menimbulkan reaksi sosial berupa sanksi, baik dalam bentuk formal maupun informal.

Dalam perspektif sosiologi klasik, penyimpangan sosial tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Penyimpangan dapat berfungsi sebagai indikator adanya perubahan sosial atau ketidaksesuaian antara norma yang ada dengan realitas sosial yang berkembang. Dengan kata lain, penyimpangan sosial dapat menjadi cerminan dari adanya ketegangan dalam sistem sosial yang memerlukan penyesuaian. Penyimpangan sosial juga bersifat relatif dan kontekstual. Artinya, suatu perilaku yang dianggap menyimpang dalam satu

BAB 10

GENDER DAN KETIDAKSETARAAN

Muhammad Hamka Halim

A. PROBLEMATIKA GENDER DALAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN PENDIDIKAN

Secara historis, persoalan gender muncul karena adanya ketimpangan akses dan peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh sistem sosial patriarki. Dalam kajian sejarah pendidikan di Indonesia, perempuan sering ditempatkan pada posisi subordinat terutama dalam akses pendidikan formal. Wiyatmi menunjukkan bahwa pada masa kolonial terdapat kesenjangan signifikan antara jumlah perempuan dan laki-laki dalam pendidikan dasar (Wiyatmi, 2013, p. 63). Kondisi ini menegaskan bahwa sejak awal pendidikan tidak bersifat netral, melainkan mereproduksi struktur sosial yang bias gender. Ketimpangan historis ini menjelaskan bahwa gender dipermasalahkan karena sejak awal menjadi alat legitimasi pembagian peran yang tidak setara.

Dalam perspektif sosiologis, Sylvia Walby menyatakan bahwa ketidakadilan gender bersumber dari struktur patriarki yang terinstitusionalisasi dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam artikelnya, Sylvia Walby menegaskan bahwa patriarki bekerja melalui sistem sosial yang kompleks, bukan sekedar relasi individu (Walby, 1989, p. 20). Pandangan ini memperkuat bahwa gender dipermasalahkan karena ia terintegrasi dalam struktur kekuasaan sehingga katimpangan tidak terjadi secara alami, melainkan sistemik.

Dalam konteks pendidikan, problematika gender terlihat dari bagaimana kurikulum dan praktik pembelajaran seringkali mengabaikan pengalaman perempuan dan kelompok marginal. Menunjukkan bahwa pengetahuan yang berkembang dalam pendidikan kerap menegasikan sudut pandang kelompok rentan, termasuk perempuan (Hendrastiti & Setiahadi, 2022, p. 311). Hal ini menyebabkan perempuan tidak hanya

BAB 11

KONFLIK SOSIAL DAN DISINTEGRASI

Nurul Syahruni

A. DEFINISI KONFLIK SOSIAL DAN DESINTEGRASI SOSIAL

1. Konflik Sosial

Konflik sosial adalah proses interaksi yang ditandai oleh pertentangan kepentingan, nilai, atau sumber daya antar individu atau kelompok. Menurut Lewis A. Coser, konflik merupakan bagian normal dari struktur sosial dan dapat memperkuat solidaritas kelompok tertentu ketika dikelola secara tepat. “Konflik tidak selalu merusak; ia dapat memperjelas batas sosial dan memperkuat kohesi internal kelompok” (Coser, 1998).

Disintegrasi terjadi ketika konflik merusak norma bersama, melemahkan kepercayaan sosial, dan memecah kohesi kelompok. Konflik sosial adalah suatu proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang ditandai oleh adanya pertentangan dalam hal kepentingan, nilai, ideologi, atau perebutan sumber daya. Konflik tidak selalu berakibat negatif secara mutlak. Menurut *Lewis A. Coser* (1998), konflik merupakan bagian yang wajar dari struktur masyarakat dan sejatinya dapat membantu memperjelas batas-batas sosial serta memperkuat solidaritas internal suatu kelompok sepanjang konflik itu dikelola dengan baik: “*Konflik tidak selalu merusak; ia dapat memperjelas batas sosial dan memperkuat kohesi internal kelompok*.” Walaupun demikian, jika konflik berlangsung terus-menerus tanpa ada penyelesaian yang baik, konflik bisa menyisakan lukanya sendiri dalam hubungan sosial masyarakat.

Disintegrasi sosial merujuk pada sebuah kondisi di mana ikatan bersama di dalam masyarakat mulai terkikis dan bahkan putus sama sekali. Dalam keadaan ini, rasa persatuan, saling percaya, dan norma bersama yang menjadi dasar hubungan sosial mulai melemah atau hilang, sehingga masyarakat cenderung terpecah-pecah. Secara sederhana, disintegrasi berarti keruntuhan atau terurainya persatuan dalam kelompok sosial yang

BAB 12

DISABILITAS DAN EKSKLUSI SOSIAL

Widya Anugrah Rusdi

A. MODEL MEDIS VS SOSIAL

World Health Organization mendefinisikan disabilitas sebagai hasil dari interaksi antara kondisi kesehatan individu dengan faktor lingkungan serta faktor personal yang dapat membatasi partisipasi seseorang dalam kehidupan sehari-hari (WHO, 2011). Dalam konteks Indonesia, disabilitas didefinisikan secara hukum sebagai kondisi yang berkaitan dengan hambatan jangka panjang yang dapat memengaruhi kemampuan individu dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh di masyarakat (UU No. 8 Tahun 2016). Terdapat berbagai sudut pandang dalam memahami disabilitas, dan sudut pandang tersebut berpengaruh terhadap cara disabilitas didefinisikan. Definisi yang didasarkan pada sudut pandang tertentu selanjutnya membentuk model-model disabilitas, yang secara bersamaan memengaruhi cara masyarakat berpikir, bersikap, dan merespons isu disabilitas. Dalam pemikiran modern tentang disabilitas, terdapat dua model utama yang paling berpengaruh, yaitu model medis (medical model) dan model sosial (social model).

1. Model Medis

Dalam model medis, disabilitas dipandang sebagai masalah yang bersumber dari gangguan fisik atau mental individu. Disabilitas dianggap sebagai kondisi abnormal yang perlu diperbaiki melalui intervensi medis, rehabilitasi, atau terapi profesional (Oliver, 1990). Dalam pendekatan ini, disabilitas dipahami sebagai akibat langsung dari penyakit atau gangguan fungsi tubuh yang menyebabkan keterbatasan aktivitas dan partisipasi individu (World Health Organization, 1980). Oleh karena itu, masyarakat cenderung memandang penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki kekurangan atau keterbatasan yang harus diperbaiki sehingga tanggung jawab utama penanganan disabilitas lebih banyak dibebankan

BAB 13

PROBLEMATIKA WILAYAH PESISIR

Astria Wulandari

A. KEMISKINAN NELAYAN

Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap sumber daya, peluang, dan kekuasaan. Dalam konteks komunitas nelayan, kemiskinan telah menjadi isu struktural yang mengakar dan melampaui generasi. Ironi besar terletak pada kenyataan bahwa kelompok masyarakat yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan yang kaya akan sumber daya alam justru kerap berada pada posisi paling rentan secara ekonomi. Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai kondisi alamiah atau takdir, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor sistemik yang saling terkait, mulai dari aspek ekologi, ekonomi, hingga politik kebijakan.

Nelayan, khususnya nelayan skala kecil (small scale fishers), menghadapi tantangan multidimensional. Mereka berada dalam sistem yang dirancang secara tidak langsung untuk menguntungkan aktor-aktor pemilik modal besar (middlemen atau ponggawa), sementara mereka sendiri hanya menerima residu keuntungan. Memahami kemiskinan nelayan memerlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya melihat pada rendahnya pendapatan rumah tangga, tetapi juga pada kerentanan (*vulnerability*), keterisolasian, serta ketidakberdayaan dalam menghadapi fluktuasi pasar dan kerusakan lingkungan. Sebagaimana ditegaskan oleh Satria (2015), kemiskinan nelayan merupakan produk dari relasi kuasa yang timpang dalam sistem produksi perikanan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan adalah karakteristik musiman (*seasonality*) dan tingginya tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dalam aktivitas penangkapan ikan. Pendapatan nelayan bersifat fluktuatif, sangat bergantung pada musim penangkapan (musim timur dan musim barat) serta kondisi cuaca.

BAB 14

KRISIS LINGKUNGAN

Nur Fadhilah Murtadir

A. KERUSAKAN HUTAN DAN TAMBANG

Negara Indonesia saat ini juga mengalami permasalahan yang cukup serius mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin meningkat. Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi tanggung jawab besar karena akan menyangkut kualitas kehidupan yang akan datang. Eksploitasi pada sumber daya alam dan juga lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya alam. Maraknya kerusakan alam seperti, ekosistem lautan, rusaknya sebagaian besar hutan yang menjadi paru-paru dunia, banjir yang masih terjadi dimana-mana, tanah longsor, dan tentu masih banyak lagi. Salah satu dampak yang paling sering dirasakan di wilayah Indonesia ini adalah kebakaran hutan, dimana permasalahan kebakaran hutan hampir setiap tahun mengalami peningkatan. Kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi. *Studi International Forestry Research* (CIFOR menelaah tentang penyebab perubahan tutupan hutan yang terdiri dari perladangan berpindah, perambahan hutan, transmigrasi, pertambangan, perkebunan, hutan tanaman, pembalakan dan industri perkayuan (Indrarto et al., 2012).

Selain itu kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh kelompok profesional atau penyelundup yang didukung secara illegal oleh oknum-oknum. Pembukaan areal hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dituding sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan. Hutan yang di dalamnya terdapat beranekaragam jenis pohon dirubah menjadi tanaman monokultur, menyebabkan hilangnya biodiversitas dan keseimbangan ekologis di areal tersebut. Beberapa jenis satwa yang

BAB 15

TEKNOLOGI DAN DISRUPSI SOSIAL

Rahma Awalia

A. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Transformasi ini tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi, tetapi juga merambah ke ranah sosial, budaya, dan politik. Teknologi digital memungkinkan manusia untuk terhubung tanpa batas geografis, sehingga mempercepat arus informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, masyarakat mengalami perubahan pola interaksi yang sangat signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya. Kehadiran internet dan perangkat pintar telah mengubah cara individu memperoleh informasi dan membangun relasi sosial. Selain itu, teknologi juga menciptakan ekosistem baru yang berbasis data dan konektivitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia modern. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak luas dari perkembangan teknologi terhadap struktur sosial. Hal ini menjadi dasar untuk mengkaji lebih dalam tentang disrupsi sosial yang terjadi. (World Economic Forum, 2020).

Perkembangan teknologi digital juga ditandai dengan munculnya berbagai inovasi yang mempercepat perubahan sosial. Inovasi seperti kecerdasan buatan, big data, dan *Internet of Things* (IoT) telah mengubah cara kerja berbagai sektor industri. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan tantangan baru bagi masyarakat. Banyak pekerjaan tradisional mulai tergantikan oleh sistem otomatis yang lebih canggih. Di sisi lain, muncul pula jenis pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan digital yang tinggi. Transformasi ini menuntut individu untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin lebar.

BAB 16

NARKOTIKA DAN PENYIMPANGAN

Dwita Aprilla Amir

A. FAKTOR PENYEBAB

Narkotika didefinisikan sebagai zat atau agen farmakologis yang berasal dari sumber botani dan non-botani, yang mencakup varian sintesis dan semi-sintetik, yang memiliki potensi untuk menginduksi pengutangan atau modifikasi kesadaran, mengganggu persepsi sensorik, dan mengarah pada pengembangan ketergantungan (Jura et al., 2025). Dalam konteks sosial, penyalahgunaan narkotika termasuk bentuk penyimpangan sosial karena bertentangan dengan norma hukum, agama, dan nilai-nilai masyarakat. Permasalahan ini menjadi isu global yang juga sangat serius di Indonesia karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga stabilitas sosial (BNN, 2022). Penyalahgunnaan narkotika tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek individu maupun lingkungan sosial. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan (BNN, 2019).

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan kesadaran, persepsi, hingga perilaku seseorang. BNN (2022) menyatakan fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring bertambah tahun, terutama di kalangan remaja dan usia produktif yang menunjukkan adanya krisis sosial yang perlu ditangani secara serius dan sistematis. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif mengenai faktor penyebab, jaringan peredaran, dampak sosial, serta upaya rehabilitas menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah narkotika di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena kompleks yang

BAB 17

ANAK DAN REMAJA BERESIKO

Aidul Akbar

A. EKSPLOITASI ANAK

Anak merupakan generasi baru penerus cita-cita suatu bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Agar anak dapat menjadi generasi penerus bangsa, maka pemenuhan hak-hak anak sedari awal harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (Husin & Guntara, 2021). Menurut Keputusan Presiden No.36 tahun 1990, Setidaknya terdapat 10 hak anak yang harus dipenuhi baik oleh orang tua maupun negara, juga kesejahteraan anak harus dipastikan terpenuhi sebagaimana yang telah di atur dalam UU No. 4 tahun 1979 bahwa hak-hak yang telah diberi terhadap anak dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah dan sosial (Simbolon, 2019). Peraturan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 menjamin bahwa orang tua dan negara memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak agar anak dapat hidup dengan baik tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak yang tidak mendapatkan haknya biasanya diakibatkan oleh berbagai hal motif kurangnya penghasilan keluarga dan kesempatan untuk memanfaatkan anak-anak. Desakan ekonomi adalah salah satu alasan yang tidak sedikit muncul dalam kasus kehilangan kehadiran seseorang. orang tua untuk memenuhi hak-hak anak (Ariani et al., 2022).

Eksploitasi anak masih menjadi isu sosial yang sulit diatasi hingga saat ini, baik di tingkat daerah, negara, maupun dunia secara keseluruhan. Dalam dunia pendidikan, eksploitasi anak tidak hanya dianggap sebagai tindakan memanfaatkan tenaga atau tubuh anak secara tidak adil, tetapi juga sebagai sebuah fenomena yang terstruktur, yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan di masyarakat (Siregar & Muslem, 2022). Anak-anak, sebagai kelompok yang secara biologis dan

BAB 18

MIGRASI DAN DIASPORA

Sinta Prahastini

A. MIGRASI INTERNAL

Seiring dengan kelahiran dan kematian, migrasi merupakan salah satu elemen penting dalam dinamika kependudukan. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap, baik untuk jangka waktu tertentu maupun permanen, disebut migrasi. Berbeda dengan mobilitas harian seperti perjalanan kerja, perpindahan ini melibatkan perubahan tempat tinggal yang relatif tetap. Sederhananya, migrasi adalah perpindahan Astari (2016). Meskipun migrasi secara resmi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui batas negara, politik, atau administratif suatu negara.

Selain itu, Martin (2003) dalam Muttaqien et al. (2023) mendefinisikan migrasi sebagai perpindahan individu dari satu negara atau wilayah ke negara lain karena variasi keadaan lingkungan antara dua wilayah tersebut. Sementara itu, mantra (2012) dalam Faried et al. (2020) migrasi diartikan sebagai gerak penduduk yang melintasi batas wilayah asal menuju wilayah tujuan dengan niat untuk menetap. Definisi ini menekankan adanya dua unsur utama, yakni perpindahan geografis dan niat menetap sebagai syarat utama terjadinya migrasi. Sementara itu, Lee (1991) dalam Rahmadana (2020) menyebutkan migrasi dalam pengertian luas adalah perpindahan tempat tinggal yang bersifat tetap atau sementara (*semi permanen*). Konsep ini tidak membatasi jarak perpindahan, baik yang dekat maupun jauh, serta tidak membedakan apakah perpindahan tersebut terjadi secara sukarela ataupun karena paksaan. Selan itu, tidak ada perbedaan antara migrasi yang terjadi di dalam negeri maupun ke luar negeri. Dengan demikian, setiap bentuk perpindahan tempat tinggal dapat dikategorikan sebagai migrasi, mulai dari perpindahan jarak dekat hingga perpindahan

BAB 19

KEBIJAKAN PUBLIK

Sul Padli

A. ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL

Kebijakan publik secara umum dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan publik yang bersifat kolektif. Kebijakan ini mencerminkan pilihan strategis negara dalam mengalokasikan sumber daya, menetapkan prioritas, serta merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat (Tarigan et al., 2025). Dalam perspektif ilmu kebijakan, kebijakan publik tidak hanya mencakup produk formal berupa regulasi, tetapi juga proses politik yang melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara (Howlett, 2023). Selain itu, kebijakan publik juga dipahami sebagai instrumen intervensi negara yang bertujuan menciptakan keteraturan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Peters, 2021).

Kebijakan sosial merupakan bagian spesifik dari kebijakan publik yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan sosial mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan (Verguet et al., 2023). Dalam pengertian yang lebih operasional, kebijakan sosial dapat dipahami sebagai program dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial serta menjamin kesejahteraan warga negara (Tarigan et al., 2025). Lebih lanjut, kebijakan sosial juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial melalui intervensi negara terhadap pasar (Deacon, 2007).

Perbedaan utama antara kebijakan publik dan kebijakan sosial terletak pada ruang lingkup dan orientasinya. Kebijakan publik memiliki cakupan yang luas, meliputi seluruh sektor pemerintahan, sedangkan kebijakan sosial secara khusus diarahkan pada aspek kesejahteraan dan perlindungan

BAB 20

GIS DAN BIG DATA

Nurul Aulia

A. KONSEP PEMETAAN SOSIAL

Pemetaan spasial merupakan salah satu proses mendasar dalam pengelolaan informasi berbasis lokasi. Proses ini melibatkan penggambaran, representasi, dan analisis berbagai fenomena atau objek yang terdapat di permukaan bumi dengan memperhatikan dimensi ruang dan posisi geografisnya. Secara historis, pemetaan spasial dilakukan secara manual menggunakan alat ukur sederhana, kompas, dan kertas peta, yang menghasilkan peta konvensional berupa lembaran fisik. Namun, dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sejak akhir abad ke-20, pemetaan spasial telah mengalami transformasi besar menuju bentuk digital yang lebih akurat, fleksibel, dan dinamis.

Transformasi ini didorong oleh kebutuhan akan informasi yang lebih cepat, tepat, dan dapat diolah ulang untuk berbagai keperluan, mulai dari perencanaan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, hingga pelayanan publik. Pemetaan digital membuatnya penyimpanan data dalam jumlah besar, pembaruan informasi secara berkala, serta analisis yang lebih kompleks tanpa harus menggambar ulang peta secara manual. Dalam konteks ini, Sistem Informasi Geografis (SIG) muncul sebagai teknologi inti yang merevolusi pemetaan spasial. SIG dapat berfungsi sebagai alat pembuatan peta, juga sebagai sistem terintegrasi untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang memiliki referensi keruangan (Santoso, 2021).

SIG didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang dirancang khusus untuk menangani data spasial (data yang memiliki koordinat geografis) dan data non-spasial (atribut atau deskripsi objek). Sistem ini membuatnya pengguna untuk merepresentasikan ruang dalam bentuk dua dimensi (peta datar) maupun tiga dimensi (model elevasi atau bangunan),

BAB 21

STRATEGI TRANSFORMASI SOSIAL

Alfian Dahrun

A. COMMUNITY DEVELOPMENT

1. Konsep dan Landasan Teoretis

Community development (pengembangan masyarakat) merupakan suatu pendekatan multidimensional yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan menyelesaikan permasalahan sosial secara partisipatif dan berkelanjutan. Dalam perspektif kontemporer, community development tidak hanya dipahami sebagai proses pembangunan fisik, tetapi juga sebagai transformasi sosial yang menekankan pemberdayaan, inklusi sosial, dan keadilan distributif (Phillips & Pittman, 2008). Community development tidak hanya dipahami sebagai intervensi pembangunan berbasis wilayah, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan yang menekankan kapasitas internal masyarakat, relasi sosial, dan keberlanjutan (Dulkiah & Majid, 2025). Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan model pembangunan top-down yang cenderung mengabaikan konteks lokal dan partisipasi masyarakat (Mustanir et al., 2025).

Secara teoretis, community development berakar pada beberapa paradigma utama, yaitu teori pemberdayaan (empowerment theory), teori partisipasi, dan teori modal sosial (social capital theory). Teori pemberdayaan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas individu dan kolektif untuk mengontrol sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Perkins & Zimmerman, 1995). Sementara itu, teori partisipasi menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan (Cornwall, 2008). Di sisi lain, teori modal sosial menyoroti peran jaringan sosial, kepercayaan, dan norma kolektif dalam memperkuat kohesi sosial dan efektivitas intervensi pembangunan (Putnam, 2020). Selain itu, pendekatan community

PEMETAAN
PROBLEMATIKA SOSIAL
Konsep, Teori, dan Arah Kebijakan

Gagasan penulisan buku ini tidak lahir begitu saja, tapi disemangati oleh tiga pertimbangan ilmiah utama. Pertama, kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa problematika sosial yang demikian kompleks, tidak lagi cukup dikaji secara monodisiplin. Kedua, berbagai kebijakan publik yang sejauh ini diterapkan oleh pemerintah kota, masih seringkali kurang tepat sasaran. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak dilakukannya pemetaan sosial secara akurat dalam proses desain intervensi kebijakan. Ketiga, masih terbatasnya kajian tentang pemetaan problematika sosial yang secara spesifik mengulas tentang konsep, teori, dan arah kebijakan di Indonesia.

Kajian buku ini terdiri atas tiga bagian utama, yakni: Bab 1 hingga bab 3, membahas tentang pengenalan terhadap konsep problematika sosial, landasan teori, serta metodologi pemetaan sosial. Bab 4 hingga 18, membahas secara spesifik tentang aneka problematika sosial secara tematik, mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, pendidikan, kesehatan kekerasan gender, konflik sosial, disibilitas, wilayah pesisir, krisis ekologi, teknologi, narkotika, anak dan resiko remaja, dan migrasi. Bab 19 hingga 21 menyoal tentang kebijakan publik, pemetaan GIS dan Big Data serta strategi transformasi sosial berbasis pemberdayaan partisipatif.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

GRCBN : 62-1256-0492-087